

# **LAPORAN KEGIATAN RESES**

**MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2025 / 2026  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



Juru Bicara :

**ZAKI MUBAROK**

**SEMARANG | 24 NOVEMBER 2025**

=====

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**JI Pahlawan NO 7 Telepon (024) 8454085 PSW-123**

**LAPORAN KEGIATAN RESES**  
**MASA PERSIDANGAN PERTAMA**  
**TAHUN 2025 / 2026**  
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**DRPD PROVINSI JAWA TENGAH**

**JURU BICARA : ZAKI MUBAROK**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh***

***Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,Om Swastyastu, Namu Buddhaya dan Salam Kebajikan.***

- Yth. Saudara Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili;
- Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta,
- Hadirin Sidang Paripurna DPRD, rekan-rekan wartawan, adik adik mahasiswa dan seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada yang berbahagia.

Pertama kami mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah pada hari ini dengan salah satu agendanya yaitu Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2025 / 2026 dari Fraksi - Fraksi DPRD Jawa Tengah.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, tauuladan dalam membimbing masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan iringan doa semoga kita dapat meneladani perilaku beliau. Amin Ya robbal 'alamin

Kegiatan Reses merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusional anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dalam menjangkau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Melalui kegiatan ini, para anggota dewan turun

langsung ke masyarakat untuk mendengar, menyerap, dan menindaklanjuti berbagai persoalan serta harapan warga terhadap pembangunan daerah.

Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2025 / 2026 telah dilaksanakan oleh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal **13-20 Oktober 2025** dengan kegiatan menyerap, menampung aspirasi serta memastikan program dan capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai dengan amanat yang digariskan.

### **Pimpinan Dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,**

Pelaksanaan reses dilakukan di tengah berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa isu aktual yang mencuat turut menjadi perhatian masyarakat dan menjadi bahan penting dalam dialog antara wakil rakyat dan konstituen diantaranya :

Secara umum kondisi Jawa Tengah dari sisi **ekonomi dan ketahanan pangan**, masyarakat masih merasakan dampak fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Inflasi tahunan di Jawa Tengah pada September 2025 tercatat sebesar **2,65 persen**, dengan kontribusi terbesar berasal dari kenaikan harga makanan pokok, Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan petani, peternak, dan konsumen rumah tangga, sehingga aspirasi yang banyak muncul berkaitan dengan perlunya pengendalian harga pangan, penguatan rantai pasok, dan pemberdayaan petani serta peternak lokal.

Sementara dari aspek **pertumbuhan ekonomi daerah**, kinerja perekonomian Jawa Tengah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai **5,37 persen** pada Triwulan III Tahun 2025. Industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan. Namun demikian,

masyarakat di sektor pertanian masih menghadapi tantangan berat karena terjadi kontraksi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

### **Pimpinan dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,**

Beberapa masukan dari masyarakat yang dapat kami peroleh berupa usulan prioritas pembangunan wilayah, diantaranya adalah Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan mutu pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan, pelayanan publik yang professional serta Pemerataan pembangunan yang dilaporkan dalam beberapa bidang sebagai berikut :

#### **A. BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Pembangunan di Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui peningkatan **pembangunan infrastruktur** yang merata dan berkeadilan. Infrastruktur menjadi kunci utama dalam mempercepat konektivitas antarwilayah, menekan disparitas pembangunan, serta mendukung produktivitas masyarakat di sektor pertanian, industri, dan jasa. Kami simpulkan bahwa kebijakan ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025/2026, sebagian besar aspirasi masyarakat di daerah pemilihan mengarah pada kebutuhan peningkatan dan pemerataan infrastruktur, baik yang bersifat dasar maupun penunjang kegiatan ekonomi. Di berbagai wilayah, masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan provinsi dan jalan penghubung antar-kabupaten yang masih rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Jalan yang rusak bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat distribusi hasil pertanian dan perdagangan antarwilayah.

***(Reses di Jepara, Kabupaten Semarang, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Tegal, Wonogiri, Purbalingga, Kebumen, Tegal, Kota Semarang, Pemalang, Blora, Sragen dan Kabupaten Magelang)***

Selain persoalan infrastruktur jalan, aspirasi masyarakat juga menyoroti pentingnya perbaikan dan pembangunan jembatan, talud dan penerangan jalan raya terutama di daerah pedesaan dan wilayah perbatasan antar-kabupaten. Banyak jembatan tau talud yang sudah berusia tua dan mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

***(Reses di Sukoharjo, Klaten, Demak, Kudus, Batang, Wonogiri, Kendal, Purworejo, Banyumas dan Brebes)***

Di sektor irigasi dan pengairan, masyarakat petani di beberapa daerah menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memperkuat sistem irigasi pertanian, baik melalui rehabilitasi saluran yang rusak maupun pembangunan saluran baru. Kondisi ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi dalam menjaga ketahanan pangan daerah, terutama karena sektor pertanian Jawa Tengah masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan.

***(Reses di Klaten, Boyolali, Magelang, Purworejo, Kabupaten Semarang, Grobogan, Pemalang, Temanggung, Banjarnegara dan Karanganyar)***

Aspirasi lain yang cukup menonjol adalah mengenai **infrastruktur pendidikan dan kesehatan**. Masyarakat berharap adanya peningkatan sarana sekolah, terutama di daerah yang sulit dijangkau, serta perbaikan fasilitas kesehatan daerah agar pelayanan publik dapat berjalan optimal. Infrastruktur sosial seperti gedung layanan publik, pasar rakyat, dan balai desa juga menjadi kebutuhan prioritas yang diharapkan dapat diperhatikan dalam alokasi anggaran pembangunan daerah.

***(Reses hampir di seluruh daerah)***

Selain itu, beberapa daerah menyampaikan aspirasi terkait **penataan drainase, pengendalian banjir, dan perbaikan jaringan air bersih**. Cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi pada periode September – November 2025 telah menyebabkan genangan di sejumlah kawasan yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sistem drainase dan infrastruktur pengelolaan air menjadi kebutuhan mendesak untuk ditindaklanjuti.

Hasil reses menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung program pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemerataan. Mereka berharap pembangunan infrastruktur dilakukan secara terencana, berkeadilan, dan memperhatikan potensi lokal di setiap wilayah.

***(Reses di Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kudus, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Jepara, Pati, Grobogan, Banyumas dan Cilacap)***

## **B. BIDANG PENDIDIKAN**

Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Provinsi menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan daerah serta kebijakan nasional dalam penguatan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaan **Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025/2026**, anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama terkait penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar, menengah, dan pendidikan nonformal. Hasil penyerapan aspirasi menunjukkan bahwa bidang pendidikan masih menjadi perhatian utama masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Beberapa **isu strategis dan aspirasi masyarakat** yang mengemuka selama reses antara lain sebagai berikut:

### **1. Pemerataan Akses Pendidikan**

Masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, baik karena jarak sekolah yang jauh maupun kondisi infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Di beberapa wilayah, masih ditemukan sekolah dasar dengan ruang kelas rusak dan kekurangan sarana belajar yang layak khususnya lembaga pendidikan swasta. Aspirasi masyarakat mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, terutama di daerah 3T (*tertinggal, terpencil, dan terluar*).

### **2. Kesejahteraan dan Pemerataan Tenaga Pendidik**

Banyak guru, terutama guru honorer dan non-ASN, masih menghadapi ketimpangan kesejahteraan dan status kepegawaian yang belum jelas. Aspirasi masyarakat meminta agar DPRD mendorong pemerintah daerah memperjuangkan peningkatan tunjangan dan kepastian status bagi tenaga pendidik, serta memperhatikan distribusi guru di wilayah terpencil.

### **3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran**

Di era digital saat ini, masyarakat berharap sekolah di Jawa Tengah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Aspirasi yang muncul mencakup peningkatan pelatihan guru dalam pembelajaran berbasis digital, penyediaan perangkat teknologi pendidikan, dan penguatan kurikulum berbasis karakter serta kecakapan abad 21. Masyarakat juga menekankan pentingnya pengembangan pembelajaran vokasional dan pendidikan berbasis keterampilan kerja agar lulusan siap menghadapi dunia industri.

#### **4. Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan Kesempatan**

Masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memperluas akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masih banyak sekolah inklusif yang kekurangan tenaga pendamping profesional dan fasilitas penunjang. Aspirasi juga datang dari kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan, seragam, serta perlengkapan sekolah.

#### **5. Fasilitas dan Sarana Pendukung**

Kondisi sejumlah sekolah masih memprihatinkan, terutama pada aspek sanitasi, ruang laboratorium, dan perpustakaan. Masyarakat meminta adanya peningkatan sarana pendukung pendidikan yang layak dan aman, termasuk jaringan internet untuk menunjang kegiatan belajar berbasis teknologi.

#### **6. Kolaborasi Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)**

Aspirasi lain yang muncul adalah perlunya memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri untuk menciptakan link and match antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini dianggap penting terutama bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) agar lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dan terserap di pasar kerja.

## **7. Perhatian Pemerintah Atas Lembaga Pendidikan swasta dan Pondok Pesantren**

Dalam pelaksanaan reses yang dilakukan di daerah pemilihan, sejumlah aspirasi masyarakat muncul terkait dunia pendidikan, khususnya pendidikan swasta dan pondok pesantren. Masyarakat dan para pengasuh pesantren menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pesantren yang saat ini masih sangat terbatas.

Banyak pendidikan swasta dan pondok pesantren di berbagai wilayah masih menghadapi kendala infrastruktur, mulai dari ruang belajar yang tidak layak, asrama santri yang sempit dan kurang ventilasi, hingga fasilitas pendukung seperti Asrama santri, ruang kelas hingga fasilitas ibadah dan sanitasi yang belum memadai. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar di lingkungan pesantren.

Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah mendorong aspirasi ini akan agar menjadi bahan kebijakan dan prioritas dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam bentuk bantuan rehabilitasi dan pembangunan gedung lembaga pendidikan swasta dan pondok pesantren. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan infrastruktur, sehingga lembaga pendidikan swasta dan keagamaan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

## **C. BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN NELAYAN**

### **1. Bidang Pertanian**

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Tengah serta menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional. Masyarakat petani di berbagai wilayah

seperti Grobogan, Pati, Demak, Sragen, dan Cilacap menyampaikan bahwa kebijakan penurunan HET pupuk sangat membantu, namun perlu diiringi dengan perbaikan sistem distribusi agar pupuk benar-benar sampai tepat waktu dan tepat sasaran.

Masih banyak laporan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di awal musim tanam yang menyebabkan keterlambatan proses penanaman dan penurunan produktivitas lahan.

Petani juga mengeluhkan harga jual gabah yang cenderung rendah saat panen raya, sementara biaya produksi tetap tinggi. Mereka mendorong agar pemerintah daerah memperkuat peran BUMD pangan atau koperasi tani dalam menstabilkan harga hasil pertanian.

## **2. Bidang Peternakan**

Di sektor peternakan, masyarakat peternak di Boyolali, Blora, dan Wonosobo masih menghadapi dampak penyakit hewan menular seperti PMK dan LSD yang berpengaruh pada penurunan populasi ternak dan pendapatan peternak.

Masyarakat mengharapkan peningkatan dukungan vaksinasi, pendampingan medis veteriner, serta pengawasan lalu lintas ternak antar daerah.

Selain itu, kenaikan harga pakan ternak dan fluktuasi harga jual daging dan telur masih menjadi masalah yang cukup serius. Peternak berharap adanya subsidi pakan lokal berbasis bahan baku pertanian daerah, sehingga biaya produksi bisa ditekan.

### 3. Bidang Perikanan dan Kelautan

Nelayan di wilayah pantura seperti Rembang, Pati, Pekalongan, dan Tegal menyampaikan kendala sulitnya mendapatkan BBM subsidi di SPBN yang menurunkan frekuensi melaut. Selain itu, kerusakan ekosistem pesisir dan abrasi pantai kian mengancam permukiman nelayan dan mengurangi potensi tangkapan ikan.

Masyarakat nelayan berharap adanya perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pembangunan sarana prasarana, serta dukungan permodalan untuk usaha pengolahan hasil laut, agar nilai tambah ekonomi nelayan bisa dirasakan di tingkat lokal.

## D. BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI

Dibidang Sosial dan ekonomi, hasil pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Masa Sidang Pertama Tahun 2025/2026 menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai daerah mengharapkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi rakyat. **(Kebumen, Purbalingga, Magelang, Sragen, dan Wonogiri)**

Masyarakat menilai pentingnya **penguatan sektor UMKM dan koperasi**, kemudahan akses permodalan, serta pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Selain itu, mereka meminta perhatian terhadap **pengembangan potensi lokal** di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan agar memiliki nilai tambah ekonomi.

Aspirasi lainnya menyoroti perlunya **perbaikan jalan produksi dan fasilitas pasar rakyat**, Masyarakat berharap pembangunan di Jawa

Tengah dapat lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Lebih jauh lagi, aspirasi masyarakat menunjukkan perlunya dukungan pada bidang keterampilan dan pendidikan vokasi. Pelatihan kewirausahaan, kursus keterampilan kerja, hingga pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri menjadi sangat penting agar generasi muda memiliki peluang kerja yang lebih luas.

Dengan demikian, usulan hasil reses ini menegaskan bahwa masyarakat di berbagai daerah Jawa Tengah menginginkan pembangunan yang lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Harapan mereka adalah agar pembangunan tidak hanya menghasilkan jalan, jembatan, atau gedung baru, tetapi juga mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga dan komunitas mereka.

**Pimpinan dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,**

Demikian Penyampaian Laporan hasil Reses dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa sidang Pertama tahun 2025 / 20256.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik, Amin.

***Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Semarang, 24 November 2025

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

ttd

H. Abdul Hamid, S.Pd.I., M.Pd

*Ketua*

ttd

Ni'matul Azizah, S.H.I

*Sekretaris*